



Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah patut kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas segala rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 dapat diselesaikan tepat waktu.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur memuat informasi kinerja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur dalam menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan dan melaksanakan kebijakan pemerintahan terutama bertanggungjawab atas perencanaan pembangunan daerah sesuai dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi serta Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) **BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat gambaran tingkat pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2019.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur ini disusun, agar dapat bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.

Sampit, Pebruari 2019

**Plt.KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**

RAMADANSYAH S.E.,M.Ec.Dev

Pembina

NIP. 19740902 199403 1 003



Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP)
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Gambaran Umum Organisasi	1
1.2. Aspek Strategis Organisasi.....	10
1.3. Isu-Isu Strategis	12
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	18
2.1. Rencana Strategis.....	18
2.2. Rencana Kinerja Tahunan.....	23
2.3. Perjanjian Kinerja.....	27
2.4. Indikator Kinerja Utama.....	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	32
3.1. Capaian Kinerja Bappeda.....	32
3.2. Akuntabilitas Keuangan.....	52
BAB IV PENUTUP.....	61
4.1. Kesimpulan	61
4.2. Permasalahan.....	62
4.3. Strategi Peningkatan Kinerja	63



Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) **BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Bappeda merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, bertugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan dan melaksanakan kebijakan pemerintahan terutama bertanggungjawab atas perencanaan pembangunan daerah. Kewenangan perencanaan tersebut dipertegas dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 219 ayat (1) huruf a dan d, dan Pasal 260 ayat (2), bahwa Bappeda sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda selalu berupaya untuk meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga perencanaan yang handal dalam semua aspek pembangunan termasuk penerapan *good governance* secara konsisten. Untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur lima tahun ke depan, Bappeda memprioritaskan pada peningkatan kualitas dan mutu pelayanan publik, serta efisiensi dan efektifitas tata kelola pemerintahan dan pengelolaan sumberdaya yang dimiliki.

Sistem pengendalian dan evaluasi akan terus dioptimalkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan penilaian atas pelaksanaannya serta kajian strategik pembangunan daerah, baik yang terkait dengan metodologi dan pelaksanaan maupun penggunaan dan tindak lanjut hasilnya. Selain itu, peningkatan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seluruh aparatur Bappeda akan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) **BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

terus dipacu untuk meningkatkan produk perencanaan yang dinamis, efektif, dan efisien. Terkait dengan hal tersebut, tantangan berupa perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal harus mampu diatasi oleh setiap bidang di lingkungan Bappeda dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang.

Terorganisirnya basis data dan informasi pembangunan merupakan salah satu prioritas program/kegiatan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur kedepan, sehingga masyarakat, *stakeholders/pemangku kepentingan*, maupun lembaga pemerintah lain akan lebih mudah untuk mengakses, mencari, serta menggunakan data dan informasi sebagai input dalam proses perencanaan pembangunan. Bappeda akan berupaya secara kontinyu menjamin produk perencanaan dan hasil kajian strategik pembangunan tidak hanya berdaya guna dan berdaya hasil bagi penentu kebijakan, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh *stakeholders* dan masyarakat umum.

Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur masih perlu penyempurnaan dalam menyusun perencanaan pembangunan maupun dalam menjalankan fungsi monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Akan tetapi terdapat hal positif lainnya yaitu, Tim Evaluasi Pengawasan Penyerapan Realisasi Anggaran (TEPPRA) yang telah dibentuk adalah sebagai upaya dalam pengendalian dan percepatan penyerapan anggaran APBD Kabupaten Kotawaringin Timur dan yang telah berhasil menunjukkan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi



Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

1. Tugas Pokok Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan salah satu unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten. Pada Bab III Pasal 5 huruf e dinyatakan bahwa Bappeda sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan melaksanakan 2 (dua) fungsi, yaitu :

1. fungsi penunjang perencanaan pembangunan dan;
2. fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi serta Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, menyebutkan bahwa Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan penyusunan, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penilaian atas pelaksanaannya.

2. Fungsi Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur

Sebagai instansi yang memiliki peran penting dalam pembangunan daerah, Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur harus menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bappeda mempunyai atau menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :

1. Penyusunan pola perencanaan pembangunan daerah menurut tingkatan dan tahapan sesuai ketentuan yang berlaku;



Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP)
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

2. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah/RPJPD, jangka menengah/RPJMD dan jangka pendek/RKPD;
3. Perumusan kebijakan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan teknologi daerah;
4. Pengoordinasian kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi sosial dan budaya, bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, bidang infrastruktur dan permukiman serta bidang penelitian, pengembangan teknologi dan inovasi.
5. Penyusunan program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana pembangunan daerah jangka menengah dalam bidang ekonomi sosial dan budaya, bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, bidang infrastruktur dan permukiman serta penelitian, pengembangan teknologi dan inovasi;
6. Pengoordinasian dan kerjasama program penelitian, pengembangan teknologi dan inovasi di lingkungan pemerintah daerah kabupaten dan lembaga lain serta kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
7. Pengoordinasian perencanaan antar Perangkat Daerah (PD) di lingkungan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur maupun instansi lain;
8. Pelaksanaan, pemantauan, penilaian, pelaporan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan jangka tahunan;
9. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja badan; dan
10. Pengoptimalisasian kinerja badan untuk mencapai visi dan misi daerah.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Bappeda seperti yang diuraikan di atas, Bappeda dipimpin oleh Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, ekonomi, sosial dan budaya, infrastruktur dan permukiman, penelitian dan pengembangan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Badan.

Mengacu pada uraian tugas dan fungsi, pelaksanaan pelayanan kinerja Bappeda memiliki 3 (tiga) peran yang saling terkait, yaitu sebagai : (1) lembaga yang mengoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan perencanaan pembangunan daerah; (2) pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, (3) penelitian dan pengembangan. Ketiga peran tersebut dijabarkan ke dalam pelaksanaan berbagai kegiatan strategis. Bappeda sebagai penyusun rencana pembangunan daerah untuk jangka panjang /RPJPD, menengah /RPJMD maupun tahunan /RKPD.

Untuk mendukung peran tersebut, Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai kewenangan:

- 1) Penetapan petunjuk pelaksanaan mengenai :
 - perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah pada skala Kabupaten
 - pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah Kecamatan.
- 2) Pelaksanaan :
 - perencanaan pembangunan daerah Kabupaten:
 - memfasilitasi Musrenbang RKPD Kabupaten di Kelurahan dan Kecamatan;



Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

- mengoordinasikan/memfasilitasi pelaksanaan rapat Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD tingkat Kabupaten;
- mengoordinasikan/memfasilitasi Perangkat Daerah pada Musrenbang RKPD tingkat Provinsi;
- mengoordinasikan/memfasilitasi Perangkat Daerah pada Musrenbang Regional dan Musrenbang Nasional.
- pengoordinasian penyusunan program kegiatan Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal;
- penelitian dan pengembangan inovasi dan teknologi daerah serta kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala Kabupaten.

3) Bimbingan, konsultasi dan koordinasi :

- pelaksanaan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala Kabupaten;
- pelaksanaan konsultasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala Kabupaten;
- pelaksanaan bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar Kecamatan/Desa dan antar Kecamatan/Desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala Kabupaten.

4) Monitoring dan evaluasi :

- pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala Kabupaten;
- penetapan petunjuk teknis pembangunan skala Kecamatan/Desa;
- pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala Kecamatan/Desa ;



Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) **BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

- pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah Kecamatan/Desa dan antara Kecamatan/Desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala Kabupaten.
- 5) Penyusunan kebijakan penelitian dan pengembangan :
- perumusan kebijakan pemerintah daerah dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang sosial dan pemerintahan
 - perumusan kebijaksanaan pemerintah daerah dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan ;
 - perumusan kebijakan pemerintah daerah dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan inovasi dan teknologi ;
 - pembinaan dan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi skala Kabupaten ;
 - penyelenggaraan kerjasama antar lembaga dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi skala Kabupaten;
 - pemberian rekomendasi ijin pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi skala Kabupaten.

3. Struktur Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur didukung oleh 55 Pegawai Negeri Sipil dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - 3. Sub Bagian Keuangan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP)
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

c. Bidang terdiri dari :

1. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :

- a) Sub Bidang Litbang Sosial dan Pemerintahan;
- b) Sub Bidang Litbang Ekonomi dan Pembangunan;
- c) Sub Bidang Litbang Inovasi dan Teknologi.

2. Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya.

- a) Sub Bidang Ekonomi dan Sumber daya Alam
- b) Sub Bidang Sosial, Budaya, Kesehatan dan Pendidikan.
- c) Sub Bidang Kependudukan dan Pemerintahan.

3. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah.

- a) Sub Bidang Penyusunan Program
- b) Sub Bidang Pendataan dan Informasi Pembangunan
- c) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi

4. Bidang Infrastruktur dan Permukiman.

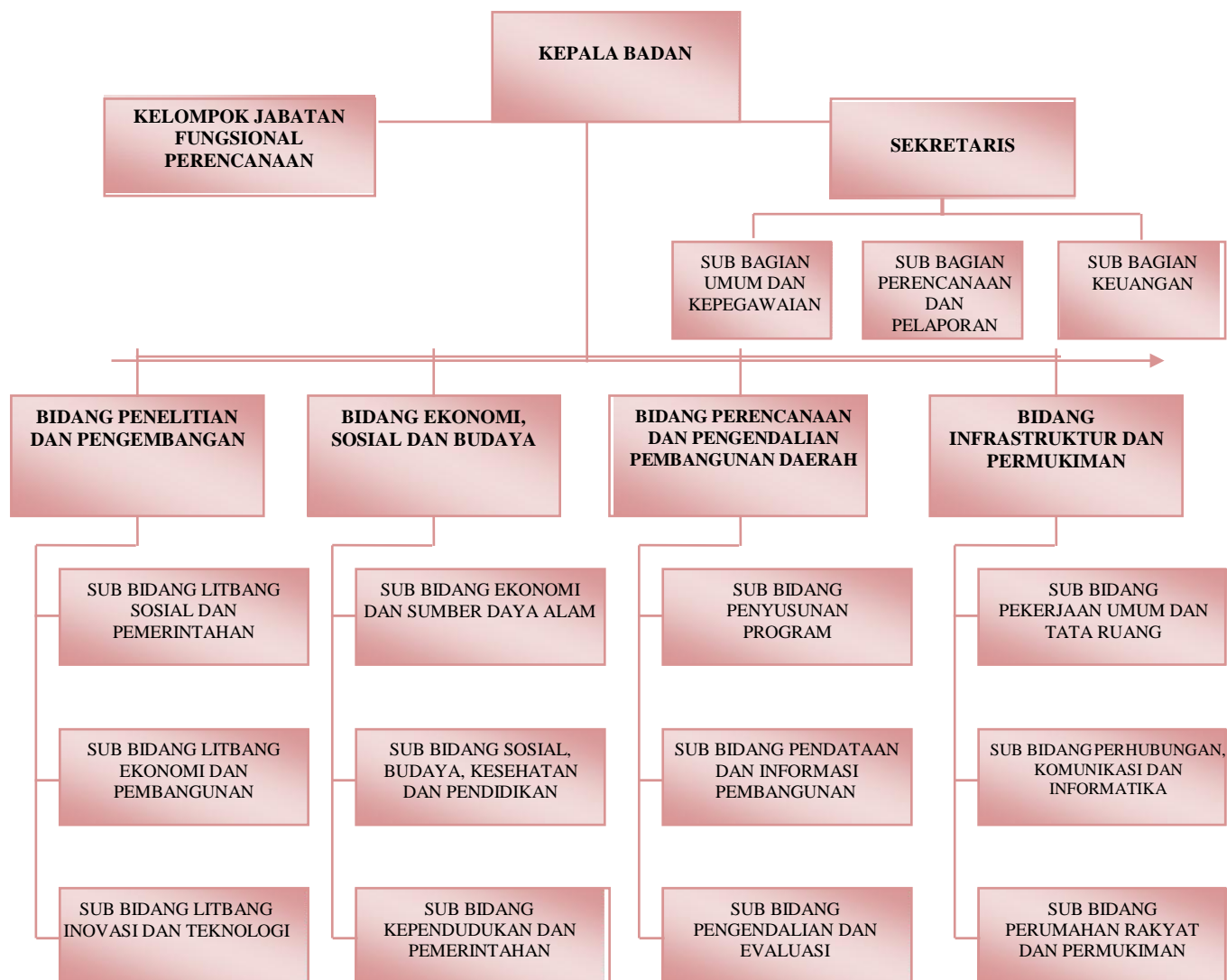
- a) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- b) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
- c) Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman

d. Kelompok jabatan fungsional



Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

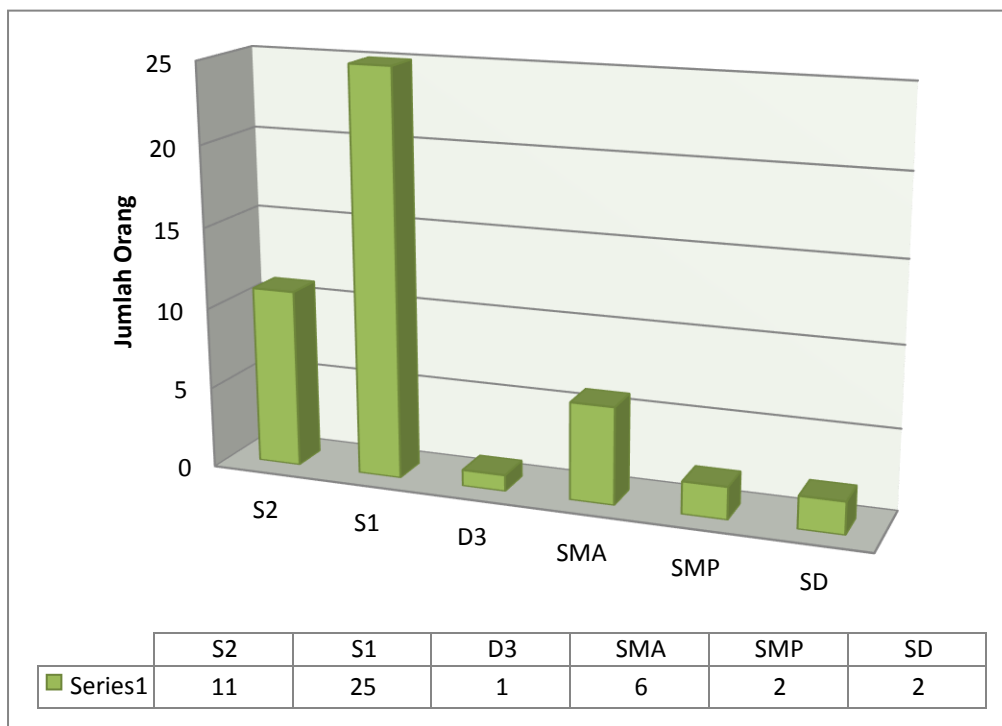
STRUKTUR ORGANISASI





Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

KEADAAN APARATUR BAPPEDA BERDASARKAN PENDIDIKAN



1.2 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah kedepan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif dan akuntabel. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai perencanaan pembangunan daerah, Bappeda bertanggungjawab dalam perumusan konsep penyelesaian masalah-masalah



Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) **BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021. Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur, beberapa aspek strategis yang mendukung pencapaian kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Aspek Strategis Internal Bappeda

- a. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kab. Kotawaringin Timur;
- b. Adanya penyelenggaraan mekanisme perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif;
- c. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain: DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat Kecamatan/ Kelurahan/ Desa, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;
- d. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran; dan
- e. Meningkatnya intensitas pendampingan penyusunan perencanaan ditingkat kecamatan/kelurahan/desa oleh Bappeda dan Perangkat Daerah terkait.

2. Aspek Strategis Eksternal Bappeda

- a. Dukungan Kepala Daerah dan DPRD Kab. Kotawaringin Timur terhadap Bappeda dalam melaksanakan pembangunan daerah;
- b. Kebijakan otonomi daerah;



Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) **BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

- c. Kewenangan dan peran Bappeda yang kuat dan luas dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya bidang perencanaan, penganggaran, dan pengendalian pembangunan;
- d. Sinergitas perencanaan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten;
- e. Kesempatan dan peluang kerjasama dengan berbagai pihak;
- f. Perkembangan teknologi dan informasi yang dapat meningkatkan kinerja aparatur seperti *e-planning*, *e-monev*, *e-proc* dan sebagainya;
- g. Pesatnya perkembangan Kabupaten Kotawaringin Timur di berbagai sektor pembangunan;
- h. Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki 4 (empat) Perguruan Tinggi dan Dewan Riset Daerah (DRD);
- i. Penyusunan rencana pembangunan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat mendapat dukungan prioritas;
- j. Memberikan dukungan untuk menyusun *road map* ekonomi Kabupaten Kotawaringin Timur;
- k. Tuntutan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif dan akuntabel.

1.3 ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis dalam setiap tahapan pembangunan daerah merupakan dinamika kehidupan lingkungan yang strategis baik regional, nasional, maupun global. Isu-isu strategis menjadi pokok bahasan yang selalu diperhatikan dalam menyusun setiap perencanaan pembangunan daerah karena dengan berpedoman pada isu-isu strategis maka segala permasalahan yang “mungkin” akan terjadi di masa mendatang dapat diantisipasi sedini mungkin.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) **BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Sebagai alat manajerial, perencanaan pembangunan bertujuan untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga. Oleh karena itu, Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun kedepan. Sebagai koordinator, Bappeda Kotawaringin Timur melakukan kegiatan koordinatif dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam rangka pelaksanaan tugas utama di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah lembaga perencanaan dan pengendalian yang bersifat lintas wilayah, sektoral, dan waktu yang diharapkan dapat mengakomodasi kebijakan-kebijakan pembangunan wilayah dan sektoral secara menyeluruh. Secara normatif, Bappeda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah serta menyelenggarakan tiga fungsi utama, yaitu merumuskan kebijakan teknis perencanaan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, serta pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan analisis dan *lesson learned* yang diperoleh dari perencanaan pembangunan Kotawaringin Timur, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Terbatasnya kualitas sumber daya aparatur pemerintah di bidang perencanaan pembangunan dan penempatannya yang belum sesuai dengan bidang keahlian.

Salah satu kunci keberhasilan perencanaan pembangunan guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sangat ditentukan oleh kemampuan dan keterampilan SDM aparatur pemerintahan. Terbatasnya



Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) **BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

kompetensi sumberdaya manusia perencana pembangunan di Bappeda untuk melakukan perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan secara baik dan akuntabel menjadi salah satu permasalahan yang belum terselesaikan. Dari sisi kuantitas, sumberdaya manusia yang tersedia sudah cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas perencanaan pembangunan secara prosedural, namun untuk menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas, Bappeda masih harus berusaha mengembangkan kualitas perencana yang dapat melakukan analisis dan kajian mendalam terkait perencanaan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur.

Aparatur pemerintah dituntut menjalankan tugas di bidang masing-masing dengan lebih ulet, terampil, cekatan, berdedikasi tinggi, bertanggung jawab, dan menuju pada suatu efisiensi dalam mencapai tujuan daerah maupun nasional. Untuk itu, pengembangan kualitas SDM aparatur pemerintah dibidang perencanaan merupakan keharusan mutlak agar dokumen perencanaan dapat disusun lebih berkualitas dan komprehensif.

2. Belum tersedianya data dan informasi pembangunan yang valid dan berkualitas

Ketersediaan data/informasi yang mendukung perencanaan pembangunan menjadi faktor penentuan dalam penyusunan Renstra SKPD. Kesiapan data/informasi sangatlah penting dalam perumusan Renstra SKPD karena data/informasi perencanaan pembangunan daerah diperlukan sebagai bahan kajian/analisis untuk merumuskan rancangan Renstra SKPD. Untuk menghasilkan perencanaan yang ideal dan optimal, maka



Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) **BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

setiap penyusunan perencanaan harus menggunakan data/informasi yang valid dan terbaru.

Tanpa data/informasi yang akurat maka perencanaan yang disusun tidak sepenuhnya tepat sasaran, kurang maksimal dalam pengambilan kebijakan, mengalami pergeseran penentuan prioritas, dan rentan pemborosan anggaran. Pada akhirnya, tujuan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

3. Rendahnya tingkat pemanfaatan dokumen perencanaan oleh masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan diupayakan untuk mendukung pencapaian pembangunan daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat sebagai objek pembangunan daerah harus dilindungi dari berbagai tekanan dan paksaan pembangunan yang dilegitimasi oleh birokrasi. Perencanaan penting untuk dipahami oleh masyarakat agar masyarakat mengerti apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu sehingga masyarakat dapat menuntut pemerintah daerah jika terdapat program dan kegiatan pemerintah daerah tidak sesuai dengan harapan mereka. Masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan daerah baik dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) **BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

4. Belum terlaksananya monitoring dan evaluasi secara elektronik (*e-monev*)

Informasi dan teknologi merupakan salah satu sumberdaya utama yang harus dikelola dengan baik. Pendayagunaan informasi serta teknologi yang tepat dan sesuai dengan peruntukannya akan sangat memengaruhi suatu proses pengambilan keputusan secara efektif dan mendukung proses perencanaan secara keseluruhan. Saat ini Bappeda Kab. Kotawaringin Timur masih dalam upaya memiliki sistem informasi perencanaan dan *monev* secara elektronik. Untuk itu diharapkan kedepan, Bappeda Kab. Kotawaringin Timur memiliki sistem informasi perencanaan secara elektronik mengingat optimalisasi sistem informasi perencanaan dan *monev* bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, kualitas perencanaan, dapat melakukan pengambilan kebijakan dan keputusan berbasis data dan bukti melalui *decision supporting system*.

5. Belum efektifnya peran pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan

Pengendalian dimaksudkan untuk menjamin suatu program/kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Monitoring bertujuan untuk mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasinya/upaya pemecahannya, sedangkan evaluasi merupakan tahapan membandingkan serangkaian kegiatan antara realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan. Jadi, sistem pengendalian, monitoring, dan evaluasi pembangunan perlu



Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) **BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan capaian perencanaan dalam pelaksanaan setiap periode pembangunan daerah. Diharapkan pada tahun depan peran pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan dapat diakses melalui e-monev.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

2.1.1.

Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional disebutkan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan atau dengan kata lain, visi adalah kondisi ideal tentang masa depan yang realistik, dapat dipercaya untuk menjadi yang diinginkan masa depan.

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi Bupati Kotawaringin Timur tahun 2016 - 2021, yaitu “Mewujudkan kabupaten yang Madani, Dinamis, Mandiri, dan Berdaya Saing Dalam Suasana Religius, Aman Dan Sejahtera (MANIS MANASAI)”, maka Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai lembaga teknis daerah yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang (RPJPD), menengah (RPJMD) dan jangka pendek (RKPD) yang sinergis, partisipatif dan akuntabel. Dokumen perencanaan pembangunan daerah ini akan digunakan sebagai acuan/pedoman seluruh PD dalam penyusunan rencana strategis dan renja PD.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas Bappeda akan berperan mendukung misi Bupati Kotawaringin Timur yang diintisarikan sebagai berikut



Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) **BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, terampil, sehat dan berakhlak.
2. Mengembangkan penguatan ekonomi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pemantapan ketahanan pangan, pengembangan produk unggulan daerah dan pemanfaatan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
4. Mengembangkan daya saing daerah melalui usaha perdagangan dan jasa, industri pengolahan, serta pariwisata dan budaya.

Bappeda sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya, maka misi yang diusung adalah misi yang ketiga yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

2.1.2. Tujuan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1(satu) sampai dengan 5(lima), sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki.

Adapun tujuan Bappeda sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2.1

Tujuan Bappeda yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi



Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) **BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN
1.	Penguatan perencanaan pembangunan yang berkualitas	Tingkat keselarasan terhadap RPJMD



keterkaitan RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Bappeda Kab.Kotim

2.1.3. Sasaran Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun



Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 periode secara tahunan.

Adapun sasaran Bappeda dalam mencapai tujuan sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Sasaran Bappeda Kab. Kotim

Tujuan RPJMD	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Kinerja Sasaran PD	Target indikator sasaran PD					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	Penguatan perencanaan pembangunan yang berkualitas	Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan	Tingkat keselarasan RKPd terhadap RPJMD	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
			Tingkat keselarasan Renstra PD dengan RPJMD	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
			Tingkat keselarasan Renja PD dengan RKPd	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja sektor perencanaan dan kelitbangan	Nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	B	B	B	B	B	B
		Meningkatnya hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan daerah	Persentase hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan	N/A	50%	50%	75%	75%	75%



Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP)
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

		Meningkatnya kualitas pelayanan pada sektor perencanaan dan kelitbangan	Tingkat kepuasan mitra pada sektor perencanaan dan kelitbangan	N/A	N/A	N/A	Mem uas kan	Mem uas kan	Mem uas kan

2.1.4. ategi dan Arah Kebijakan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur.

Merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi permasalahan. Cara yang dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi SOPD.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP)
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Tabel 2.3
Strategi yang ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran melalui kebijakan

No	Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
1	2	3		4		5	
1	Penguatan perencanaan pembangunan yang berkualitas	3.1.1	Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah	3.1.1	Mengembangkan sistem pemerintahan yang integratif melalui institusionalisasi inovasi dan reformasi birokrasi dalam proses pelayanan publik di setiap tingkat pemerintahan	3.1	Akselerasi pencapaian good governance melalui optimalisasi teknologi informasi dan sistem pelayanan yang berorientasi pada hasil dan dilakukan secara reguler maupun tahun jamak
		3.1.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja sector perencanaan dan dan kelitbangan				
		3.1.3	Meningkatnya hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan daerah				



Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) **BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai perencanaan pembangunan daerah, Bappeda bertanggung jawab dalam perumusan konsep penyelesaian masala-masalah pembangunan sekarang dan kedepan di daerah dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur dan memperhatikan aspirasi dan kondisi obyektif perkembangan dan kebutuhan dlam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Rencana Strategis (renstra) Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016- 2021 yang telah disusun, maka Bappeda telah menyusun Rencana Kerja Tahun 2019 sebagai berikut :



Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Tabel 2.4

Rencana Kerja Program dan Kegiatan Tahun 2019

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program/kegiatan	Rencana tahun 2019 (tahun rencana)				Prakiraan maju rencana tahun	
		Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif	Sumber dana	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana /pagu indikatif
2	3	(7)	(8)	(9)	(10)	(13)	(14)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				9,591,361,700	APBD		
BELANJA TIDAK LANGSUNG		Bappeda Kab. Kotim		4,857,333,550			
Belanja Pegawai				4,857,333,550			
Belanja Gaji Dan Tunjangan				3,206,265,550			
Belanja Tambahan Penghasilan PNS				1,651,068,000			
BELANJA LANGSUNG				4,734,028,150	APBD		4,583,631,100
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelayanan Administrasi Kantor yang tersedia dalam mutu/waktu yang sesuai kebutuhan	Bappeda Kab. Kotim	85%	1,962,447,888		85%	1,957,717,789
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat bermaterai yang dilayani per tahun		100 buah	1,650,000		100%	1,850,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa yang dimanfaatkan untuk pelayanan kantor per tahun		3 jasa	195,720,000		100%	195,720,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara		33 kend.roda dua dan 1 mobil operasional	47,046,000		100%	57,500,000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah administrasi keuangan yang selesai tepat waktu		24 dokumen	205,050,786		100%	180,000,000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Luas kantor yang dilayani jasa kebersihan		2845 M2	104,275,786		100%	10,275,786
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang mendapat jasa perbaikan		3 unit	4,090,000		100%	7,569,452
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pegawai yang terpenuhi kebutuhan alat tulis kantor		58 pegawai	69,304,000		100%	72,300,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		12 item	75,054,300		100%	55,000,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang disediakan		11 Komponen	13,492,016		100%	16,000,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		3 item	0		0%	-
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan		3 item	0		0%	-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan		11.680 ekspl.	35,040,000		100%	34,500,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor		1000 liter	10,000,000		100%	10,000,000
Penyediaan Makanan dan Minuman	pelayanan penyelenggaraan rapat- rapat teknis		20 kali	82,000,000		100%	124,972,551
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri		40 kali	882,950,000		100%	896,320,000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dihadiri		25 kali	236,775,000		100%	295,710,000



Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP)

BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program/kegiatan	Rencana tahun 2019 (tahun rencana)				Prakiraan maju rencana tahun	
		Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif	Sumber dana	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana / pagu indikatif
2	3	(7)	(8)	(9)	(10)	(13)	(14)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase cakupan aparatur yang dilayani sarana dan prasarana memadai		80%	857,815,262			590,775,262
Pembangunan gedung kantor	Peningkatan sarana kantor yang memadai		100%	277,090,000		75%	241,500,000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan		4 item	34,050,000		90%	65,050,000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan yang dibeli		4 item	198,000,000		90%	85,000,000
Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang dibeli		1 item	41,800,000		90%	-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas yang terpelihara		5 unit	0			-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara		1 unit	126,000,000		90%	3,600,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara		6 unit	134,475,262		90%	134,475,262
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan yang dipelihara		25 item	25,400,000		90%	29,750,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan yang dipelihara		45 unit	21,000,000		90%	31,400,000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur dalam penegakan disiplin		85%	49,500,000		100%	70,995,000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya			53 stel	0		100%	40,995,000
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu			53 stel	49,500,000		100%	30,000,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah sumberdaya aparatur yang meningkat kapasitasnya			221,750,000		80%	234,452,449
Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mendapat pendidikan dan pelatihan formal			221,750,000		75%	234,452,449
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						90%	25,000,000
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SOPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SOPD yang disusun		0%	0	0	90%	25,000,000
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				1,439,665,000			1,277,090,600
Perencanaan Pembangunan				1,439,665,000			1,277,090,600
Program Pengembangan Data/Informasi	Informasi dan data yang menyangkut rencana pembangunan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat		70%	37,500,000		90%	89,640,000
Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	tersusunnya buku rekap.data fisik pembangunan APBD, buku rekap.realisasi penyerapan anggaran, buku SIPD dan buku profil kab. Kotim		150 buku	9,000,000		100%	9,000,000
Publikasi Hasil Pembangunan	Penyajian hasil pembangunan kab. kotim		1 kegiatan	28,500,000		100%	25,000,000
Pelaporan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi pemerintah Kab.Kotim	Pencapaian aksi PPK					Memuaskan	55,640,000



Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP)

BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja program/kegiatan	Rencana tahun 2019 (tahun rencana)				Prakiraan maju rencana tahun	
		Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif	Sumber dana	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif
2	3	(7)	(8)	(9)	(10)	(13)	(14)
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan rencana pembangunan yang terpadu dan harmonis dengan menerapkan prinsip partisipasi		70%	1,336,245,000		100%	1,152,450,600
Penyusunan Rancangan RKPD	Rancangan Awal RKPD Tahun 2018		1 kali konsultasi publik, 1 kali forum gabungan perangkat daerah	395,900,000		100%	395,900,000
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	terselenggaranya musrenbang RKPD kab. Kotim tahun 2018		1 kali	74,150,000		100%	130,000,000
Penetapan RKPD	tersusunnya perbup RKPD tahun 2019		1 dokumen	44,000,000		100%	44,000,000
Evaluasi dan Penilaian Pelaksanaan Hasil Pembangunan	laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemb. Di Kab. Kotim		1 kali	48,825,000		100%	86,440,600
Monitoring Hasil Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur	terlaksananya monitoring hasil kegiatan pembangunan		17 kec	114,850,000		100%	114,850,000
Rapat Koordinasi Pengendalian Kegiatan Pembangunan	Pelaksanaan Rakordal serta terlaksananya rapat tim evaluasi dan penyerapan realisasi anggaran		3 kali rakor	184,160,000		100%	184,160,000
Penyusunan RKPD Perubahan	tersusunnya Perubahan RKPD 2018		1 dokumen RKPD	197,100,000		100%	197,100,000
Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Melalui E-Planning	penyajian data yang akurat melalui sistem e-planning		1 aplikasi	277,260,000		0%	-
Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Rumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan kab dan Prov		100%	65,920,000		90%	35,000,000
Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	tersusunnya rumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan kabupaten, provinsi dan pemanfaatan basis data terpadu (BDT)		2 kegiatan	31,770,000		90%	35,000,000
Penguatan Kelembagaan TKPK Kabupaten Kotawaringin Timur	Dokumen SPKD dan LP2KD		2 dokumen	0			
Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur	tersusunnya laporan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tiap triwulan		pencapaian aksi PPK dengan kriteria memuaskan	34,150,000		0%	-
Penelitian dan Pengembangan				202,850,000			427,600,000
Program Penelitian Sumber Daya dan Potensi Pembangunan Daerah	Penelitian sumber daya dan potensi pembangunan daerah melalui IPTEK		70%	202,850,000		80%	427,600,000
Publikasi Hasil Penelitian dan Perencanaan Pembangunan	Buletin penelitian dan perencanaan pembangunan kab. Kotim		2000 ekspl	137,100,000		100%	137,000,000
Penguatan Kelembagaan IPTEK	Berfungsinya kelembagaan Iptek sesuai Perpu yang berlaku		2 lembaga	65,750,000		70%	60,000,000
Kajian Pembangunan Ekosobud	tersusunnya kajian pembangunan ekosobud		1 kajian pembangunan ekosobud	0		0%	-
Penelitian/Pengkajian Sumberdaya dan Potensi Pembangunan Daerah	hasil penelitian		dokumen hasil penelitian	0		75%	80,000,000
Penyusunan KLHS RPJMD Kab.Kotim tahun 2021 - 2026	Jumlah dokumen KLHS RPJMD			0		100%	150,600,000
Rapat Koordinasi Nasilan Kelitbangan	Terselenggaranya kegiatan kelitbangan		1 kegiatan	0	0	0%	-



Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja

No.	Tujuan Bappeda	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penguatan perencanaan pembangunan yang berkualitas	Sasaran 1 Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Tingkat keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Tingkat keselarasan Renja PD terhadap RKPD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Sasaran 2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja sektor perencanaan dan kelitbangan	Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah	B	B	B	B	A	A
		Sasaran 3 Meningkatnya hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan daerah	Persentase hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan Bupati dalam perumusan kebijakan	0%	50%	50%	75%	75%	75%



Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP)
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

		Sasaran 4 Meningkatnya kualitas pelayanan pada sektor perencanaan dan kelitbangan	Tingkat kepuasan mitra pada sektor perencanaan dan kelitbangan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan
--	--	---	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Program utama Bappeda sebagai berikut :

NO	PROGRAM	JML ANGGARAN (Rp)	KET
1	Perencanaan Pembangunan Daerah	1,279,695,000	APBD
2	Pengembangan Data/Informasi	37,500,000	APBD
3	Perencanaan Pembangunan Ekonomi	0	APBD
4	Perencanaan Sosial Dan Budaya	46,470,000	APBD
5	Penelitian Sumber Daya Dan Potensi Pembangunan Daerah	256,250,000	APBD

Program penunjang Bappeda sebagai berikut :

NO	PROGRAM	JML ANGGARAN (Rp)	KET
1	Pelayanan administrasi perkantoran	2,035,997,888	APBD
2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1,072,265,262	APBD
3	Peningkatan disiplin aparatur	49,500,000	APBD
4	Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	306,050,000	APBD

2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA

IKU Kabupaten Kotawaringin Timur dan IKU Perangkat Daerah, telah sesuai perubahan renstradan telah dibahas dan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) **BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

dikonsultasikan dengan fasilitator Kemenpan dan RB . Perjanjian Kinerja (PK) SOPD / Perangkat Daerah ditetapkan pada tanggal bulan Januari 2019, namun karena perubahan renstra Bappeda ditetapkan pada bulan April 2019, *maka PK menyesuaikan perubahan renstra dan perubahan anggaran, yaitu maka PK dibuat kembali pada bulan Oktober 2019.*

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019

- Tugas Pokok : Bappeda mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan penyusunan, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah , penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penilaian atas pelaksanaannya
- Fungsi : 1 Penyusunan pola perencanaan pembangunan daerah menurut tingkatan dan tahapan sesuai ketentuan yang berlaku;
- 2 Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), jangka menengah (RPJMD) dan jangka pendek (RKPD);
- 3 Perumusan kebijakan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan teknologi daerah;
- 4 Pengoordinasian kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi sosial dan budaya, bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, bidang



Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) **BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

infrastruktur dan permukiman serta bidang penelitian, pengembangan teknologi dan inovasi.

- 5 Penyusunan program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana pembangunan daerah jangka menengah dalam bidang ekonomi sosial dan budaya, bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, bidang infrastruktur dan permukiman serta penelitian, pengembangan teknologi dan inovasi;
- 6 Pengoordinasian dan kerjasama program penelitian, pengembangan teknologi dan inovasi di lingkungan pemerintah daerah kabupaten dan lembaga lain serta kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
- 7 Pengoordinasian perencanaan antar Perangkat Daerah (PD) di lingkungan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur maupun instansi lain;
- 8 Pelaksanaan, pemantauan, penilaian, pelaporan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan jangka tahunan;
- 9 penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Badan; dan
- 1 pengoptimalisasian kinerja Badan untuk
- 0 mencapai visi dan misi daerah.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

No.	Tujuan SOPD	Sasaran SOPD	Indikator Sasaran SOPD	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penguatan perencanaan pembangunan yang berkualitas	Sasaran 1 Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Tingkat keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Tingkat keselarasan Renja PD terhadap RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Sasaran 2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja sektor perencanaan	Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah	B	B	B	B	B	A
		Sasaran 3 Meningkatnya hasil penelitian/ka- jian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan daerah	Persentase hasil penelitian/ka- jian yang dimanfaatkan Bupati dalam perumusan kebijakan	0%	50%	50%	75%	75%	75%
		Sasaran 4 Meningkatnya kualitas pelayanan pada sektor perencanaan dan kelitbangan	Tingkat kepuasan mitra pada sektor perencanaan dan kelitbangan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP)
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

BAB III

**AKUNTABILITAS
KINERJA**

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kotim Tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019 dengan realisasi pencapaiannya.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabilasemakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakinrendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi}/\text{rencana}) \times 100\%$$

Adapun target dan capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kotim Tahun 2019 dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2019

No .	Tujuan Bappeda	Sasaran Bappeda	Indikator Sasaran Bappeda	Satuan	Targe t	Realisa si
1	2	3	4	5	6	7
	Penguatan perencanaan pembangunan yang berkualitas	Sasaran 1 Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	Persentase	100%	100%



Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP)
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

			Tingkat keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD	Persentase	100%	100%
			Tingkat keselarasan Renja PD terhadap RKPD	Persentase	100%	100%
		Sasaran 2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja sektor perencanaan dan kelitbangan	Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah(Bappeda)	Persentase	B	Belum dinilai
		Sasaran 3 Meningkatnya hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan daerah	Persentase hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan Bupati dalam perumusan kebijakan	Persentase	75%	100%
		Sasaran 4 Meningkatnya kualitas pelayanan pada sektor perencanaan dan kelitbangan	Tingkat kepuasan mitra pada sektor perencanaan dan kelitbangan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan

Selanjutnya hasil pengukuran capaian kinerja beserta analisisnya sesuai mekanisme penghitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi Bappeda Kab. Kotim.

Pengukuran capaian kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran dan hasil.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) **BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Berdasarkan target, realisasi dan tingkat capaian sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kotim Tahun 2019, dapat dijelaskan masing-masing indikator sasaran sebagai berikut:

3.1.1. Pengukuran Kinerja Sasaran Bappeda Kab. Kotim

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam wilayah / daerah tertentu dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumberdaya yang ada dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap tetapi tetap berpegang pada azas prioritas.

Berbagai unsur instansi pemerintah memiliki tugas masing-masing yang bertujuan untuk mengawal pembangunan di setiap daerah. Salah satu instansi tersebut adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Instansi ini memiliki unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

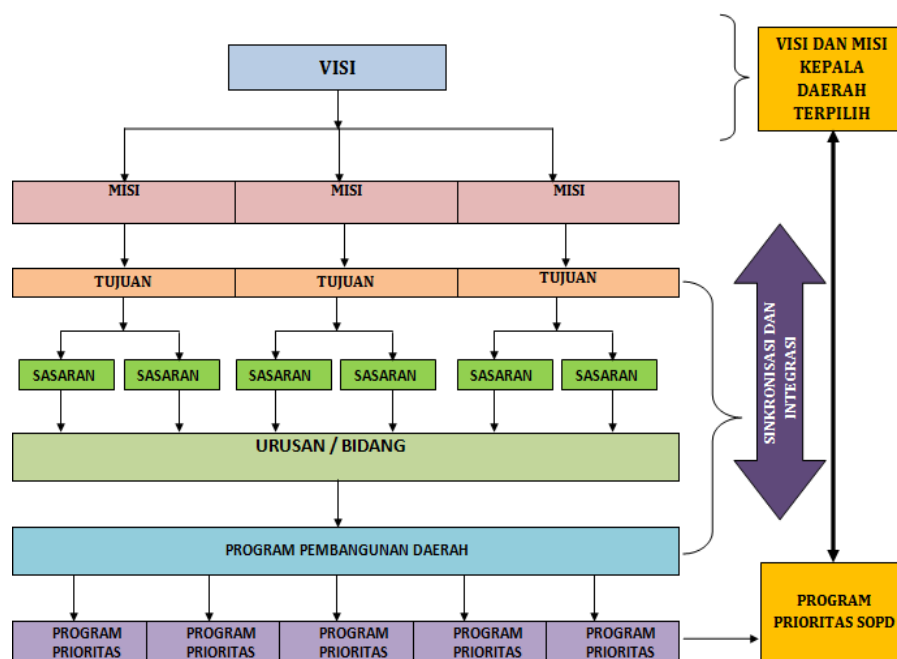
Dengan sederet tanggung jawab tersebut, maka Bappeda harus memiliki strategi atau alat agar apa yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan lancar, dipantau, dan hasilnya bisa dipertanggung jawabkan. Alat pendukung kegiatan Bappeda tersebut adalah e-planning. E-Planning adalah alat penyusunan RKPD, KUA PPAS, KUA/PPAS Perubahan, RKPD Perubahan Kabupaten/Provinsi agar dapat terselesaikan dengan mudah, cepat, dan tepat.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Sejak tahun 2018, Bappeda bekerjasama dengan BPPT, menyusun perencanaan pembangunan daerah menggunakan aplikasi SIMRAL, yaitu Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan. Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL) merupakan wujud inovasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk membangun tertib administrasi dan terjaganya konsistensi data pembangunan daerah, dengan demikian pengelolaan program dan kegiatan pembangunan serta pengelolaan keuangan di daerah bisa dipertanggungjawabkan, dan transparan.

Skema E-Planning



Gambar alur diatas merupakan acuan dalam pembuatan atau implementasi sistem e-planning yang memuat alur penyusunan dokumen perencanaan 5 tahun dan perencanaan tahunan yang meliputi dokumen RPJMD, RENSTRA SOPD, RKPD, dan RENJA SOPD.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dengan menggunakan aplikasi e-Planning , dapat menjaga sinkronisasi antar dokumen perencanaan, yaitu RPJMD, RKPD dan Renstra SOPD dan Renja SOPD hingga dokumen RKA dan DPA SOPD.



Tabel data dibawah ini menyajikan data yang diolah dari dokumen RPJMD, RKPD dan Renstra SOPD.

Tabel 3.2
Jumlah Sasaran dan Program pada RPJMD dan RKPD

No	Uraian	Jlh
1	Jumlah Sasaran pada RKPD yang sesuai dengan Perubahan RPJMD	20
2	Jumlah Sasaran pada Perubahan RPJMD	20
3	Jumlah Indikator Sasaran pada RKPD yang sesuai dengan Perubahan RPJMD	38
4	Jumlah Indikator Sasaran pada Perubahan RPJMD	38
5	Jumlah Target Sasaran pada RKPD yang sesuai dengan Perubahan RPJMD	38
6	Jumlah Target Sasaran pada Perubahan RPJMD	38
7	Jumlah Program pada RKPD yang sesuai dengan Perubahan RPJMD	226
8	Jumlah Program pada Perubahan RPJMD	308
9	Jumlah Indikator Program pada RKPD yang sesuai dengan Perubahan RPJMD	226
10	Jumlah Indikator Program pada Perubahan RPJMD	335



Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP)
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

11	Jumlah Target Program pada RKPD yang sesuai dengan Perubahan RPJMD	226
12	Jumlah Target Program pada Perubahan RPJMD	335
13	Jumlah Program pada Perubahan Renstra yang sesuai dengan Perubahan RPJMD	308
14	Jumlah Program pada Perubahan RPJMD	308
15	Jumlah Indikator Program pada Perubahan Renstra yang sesuai dengan Perubahan RPJMD	335
16	Jumlah Indikator Program pada Perubahan RPJMD	335
17	Jumlah Target Program pada Perubahan Renstra yang sesuai dengan Perubahan RPJMD	335
18	Jumlah Target Program pada Perubahan RPJMD	335
19	Jumlah program pada Renja yang sesuai dengan RKPD	226
20	Jumlah program pada RKPD	226
21	Jumlah Indikator program pada Renja yang sesuai dengan RKPD	226
22	Jumlah Indikator program pada RKPD	226
23	Jumlah Target program pada Renja yang sesuai dengan RKPD	226
24	Jumlah Target program pada RKPD	226

Untuk menilai capaian indikator kinerja sasaran, digunakan formulasi / rumus perhitungan yang telah ditetapkan melalui SK Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur, SK Nomor: 188.45/139 /huk-org/2017 Tanggal 20 Pebruari 2019 Tentang Perubahan Atas SK Bupati Nomor: 188.45/601/huk-org/2017 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Dengan memasukkan rekapitulasi data pada tabel diatas kerumus perhitungan / formulasi pengukuran kinerja, maka pencapaian kinerja setiap sasaran akan diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah

Indikator kinerja pertama yaitu :

Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD, dengan formula sebagai berikut:



Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Formulasi/Rumus Perhitungan

Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD

$$= (Ki_1 + Ki_2 + Ki_3 + Ki_4 + Ki_5 + Ki_6) / 6 = 600 / 6 = 100\%$$

Ki₁ Keselarasan Sasaran

$$= \frac{\text{Jlh Sasaran pada RKPD yang sesuai dengan PRPJMD(20)}}{\text{Jlh Sasaran pada PRPJMD(20)}} \times 100 = 100\%$$

Ki₂ Keselarasan Indikator Sasaran

$$= \frac{\text{Jlh Indikator Sasaran pada RKPD yg sesuai dgn PRPJMD(38)}}{\text{Jlh Indikator Sasaran pada RPJMD(38)}} \times 100 = 100\%$$

Ki₃ Keselarasan Target Sasaran

$$= \frac{\text{Jlh Target Sasaran pada RKPD yang sesuai dengan PRPJMD(38)}}{\text{Jlh Target Sasaran pada PRPJMD (38)}} \times 100 = 100\%$$

Ki₄ Keselarasan Program

$$= \frac{\text{Jlh Program di RKPD yang sesuai dengan PRPJMD(226)}}{\text{Jlh Program pada RKPD (226)}} \times 100 = 100\%$$

Ki₅ Keselarasan Indikator Program

$$= \frac{\text{Jlh Indikator Program di RKPD yang sesuai dengan PRJMD (226)}}{\text{Jlh Indikator Program di RKPD (226)}} \times 100 = 100\%$$

Ki₆ Keselarasan Target Program

$$= \frac{\text{Jlh Target Program pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD(226)}}{\text{Jlh Target Program pada RKPD (226)}} \times 100 = 100\%$$

Pengukuran capaian indikator kinerja kedua, yaitu :

Tingkat keselarasan renstra SOPD terhadap RPJMD, dengan formula sebagai berikut:

Formulasi/Rumus Perhitungan

Tingkat Keselarasan Renstra SOPD terhadap RPJMD

$$= (Ki_1 + Ki_2 + Ki_3) / 3 = 300 / 3 = 100\%$$

Ki₁ Keselarasan Program

$$= \frac{\text{Jlh Program pada Renstra yang sesuai dengan PRPJMD(308)}}{\text{Jlh Program pada PRPJMD (308)}} \times 100 = 100\%$$



Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) **BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

$$\begin{aligned} & \text{Ki}_2 \text{ Keselarasan Indikator Program} \\ & = \frac{\text{Jlh Indikator Program pada Renstra yg sesuai dengan RPJMD (335)}}{\text{Jlh Indikator Program pada RPJMD (335)}} \times 100 = 100\% \\ & \text{Ki}_3 \text{ Keselarasan Target Program} \\ & = \frac{\text{Jlh Target Program pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD (335)}}{\text{Jlh Target Program pada RPJMD (335)}} \times 100 = 100\% \end{aligned}$$

Pengukuran capaian indikator kinerja ketiga adalah :

Tingkat Keselarasan Renja SOPD terhadap RKPD, dengan formula sebagai berikut:

Formulasi/Rumus Perhitungan
Tingkat Keselarasan Renja SOPD terhadap RKPD = (Ki₁+ Ki₂+ Ki₃) /3= 300/3=100%
Ki ₁ Keselarasan program = $\frac{\text{Jlh program pada Renja yang sesuai dengan RKPD (226)}}{\text{Jlh program pada RKPD 226}} \times 100 = 100\%$
Ki ₂ Keselarasan Indikator program = $\frac{\text{Jlh Indikator program pada Renja yang sesuai dgn RKPD (226)}}{\text{Jlh Indikator program pada RKPD (226)}} \times 100 = 100\%$
Ki ₃ Keselarasan Target program = $\frac{\text{Jlh Target program pada Renja yang sesuai dengan RKPD (226)}}{\text{Jlh Target program pada RKPD (226)}} \times 100 = 100\%$

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja didapat bahwa rata-rata capaian sasaran tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD adalah sebesar 100% , keselarasan renstra SOPD terhadap RPJMD sebesar 100%, dan Keselarasan Renja SOPD terhadap RKPD sebesar 100%, sehingga rata-rata tingkat capaian keselarasan adalah 100%, berada pada gradasi nilai *Berhasil*. Tabel dibawah ini adalah tabel penilaian kiner / skala intensitas :



Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP)
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Skala Intensitas

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1.	Lebih dari 100%	Sangat Berhasil
2.	91% hingga 100%	Berhasil
3.	81% hingga 90%	Cukup Berhasil
4.	Kurang dari 81%	Kurang Berhasil

Sumber : Permenpan RB No.53 Tahun 2014

Tabel 3.3. Capaian Kinerja pada Indikator Keselarasan

Tujuan Bappeda	Sasaran Bappeda	Indikator Sasaran Bappeda	Satuan	Target	Realisasi	Rata - rata capaian
2	3	4	5	6	7	8
Penguatan perencanaan pembangunan yang berkualitas	Sasaran 1 Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	Persentase	100%	100%	100%
		Tingkat keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD	Persentase	100%	100%	100%
		Tingkat keselarasan Renja PD terhadap RKPD	Persentase	100%	100%	100%

Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis Bappeda, dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) . **Perjanjian kinerja** adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator **kinerja**.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR



Form Perjanjian Kinerja (PK)

Penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) Plt Kepala Bappeda dan Kepala Bidang Infrastruktur dan Permukiman

Tabel 3.4.

Sasaran, Indikator Program, Program/Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah sesuai PK

N O	SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1	2	3	4
1	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD,	Persentase tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	100%
	Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD	Persentase tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD	100%
	Tingkat keselarasan Renja PD dengan RKPD	Persentase tingkat keselarasan Renja PD dengan RKPD	100%
2.	Kualitas pelayanan pada sector perencanaan dan pengendalian pembangunan	Tingkat kepuasan mitra pada pelayanan di sector perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	Memuaskan
3	Pengembangan data dan informasi	Tingkat kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi dan data tentang rencana pembangunan pada website Bappeda	100%



Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP)
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NO	SASARAN KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	2	3	4
1	Dokumen rancangan awal RKPD 2020	Persentase penyelesaian Penyusunan Rancangan awal RKPD	100%
2	Berita Acara Kesepakatan musrenbang	Persentase Jumlah usulan program dan kegiatan yang masuk dalam RKPD	50%
3	Dokumen perbup tentang RKPD Kab. Kotim Tahun 2020	Persentase penyelesaian penyusunan dokumen perbup tentang RKPD Kab. Kotim Tahun 2020	100%
4	Dokumen perbup tentang perubahan RKPD Tahun 2020	Persentase penyelesaian penyusunan Perbup tentang Perubahan RKPD Tahun 2020	100%
5	Sinergitas dokumen perencanaan	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan melalui aplikasi simral	100%
NO	KEGIATAN	JML ANGGARAN (Rp)	KET
1	Penyusunan Rancangan RKPD	396,100,000	APBD
2	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	79,750,000	APBD
3	Penetapan RKPD	47,000,000	APBD
4	Penyusunan Perubahan RKPD	190,600,000	APBD
5	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Melalui E-Planning	70,500,000	APBD
	Jumlah	783,950,000	

2. Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja sektor perencanaan dan kelitbangan

Pencapaian indikator Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah (Bappeda) diukur dengan formula sebagai berikut :



Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP)
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Tabel 3.5 Pengukuran Kinerja (PK) sasaran 2

No	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	
				Target	%
1	Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah (Bappeda)	B		B	Belum dinilai

Untuk mengukur pencapaian indikator sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja sektor perencanaan dan kelitbangan, penilaian diformulasikan dengan membandingkan antara target dan hasil , yaitu target penilaian dibandingkan dengan hasil penilaian Laporan Kinerja Bappeda.

Sebagai data pendukung , terlampir data Laporan Evaluasi Renja Bappeda Tahun Anggaran 2019 , yang merupakan data pencapaian kinerja program dan kegiatan Bappeda mulai tahun rencana sampai dengan akhir tahun anggaran 2019.

3. Sasaran meningkatnya hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan daerah.

Pencapaian kinerja pada sasaran meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian atau hasil kajian dalam perencanaan pembangunan dengan indicator kinerja program adalah persentase rekomendasi policy brief yang diakomodasi dalam program perencanaan pembangunan.

Tabel 3.6 Pengukuran Kinerja (PK) sasaran 3

No	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	
				kinerja	satuan
1	Persentase pemanfaatan hasil penelitian atau hasil kajian yang dimanfaatkan bupati dalam perumusan kebijakan	75% (study kelayakan Lewu Itah)	kajian	100%	1 kajian



Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Pencapaian kinerja pada sasaran meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian atau hasil kajian dalam perencanaan pembangunan adalah 100%, berada pada grade berhasil.

Dalam mencapai sasaran strategis di atas, yaitu meningkatnya hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan daerah, yaitu kegiatan study kelayakan lewu itah dengan realisasi 100% dari target 75%, telah tercapai 100%.

NO	KEGIATAN	JML ANGGARAN (Rp)	KET
1	Penelitian/pengkajian sumber daya dan potensi pembangunan daerah	100,000,000	APBD
	Jumlah	100,000,000	

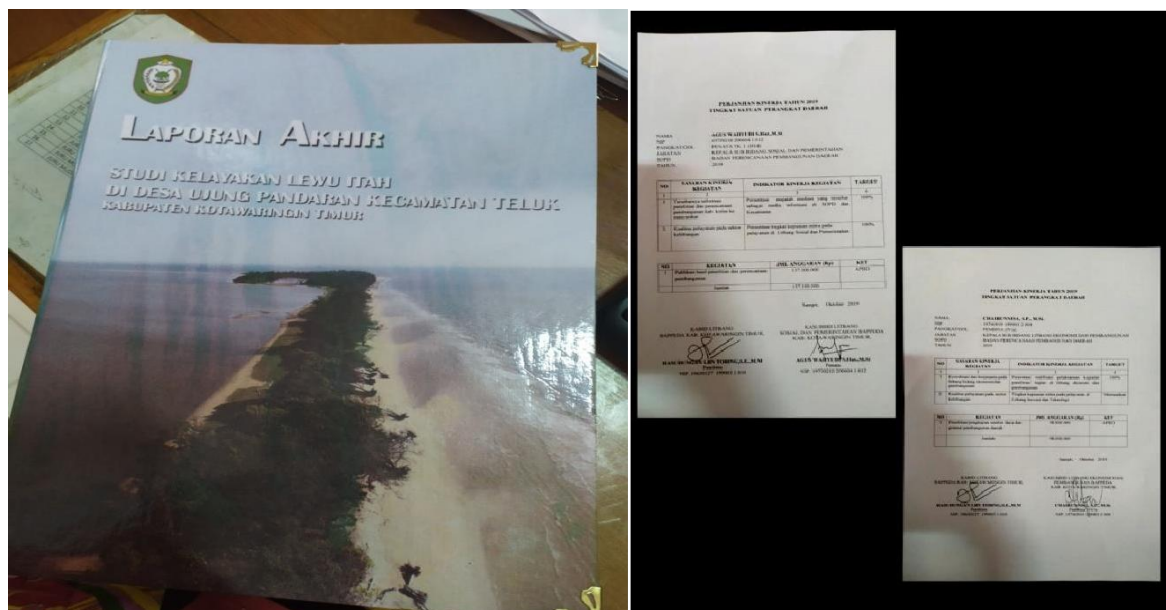


Figure 1PK untuk pelaksanaan kegiatan Study Kelayakan Lewu Itah di Ujung Pandaran TA. 2019

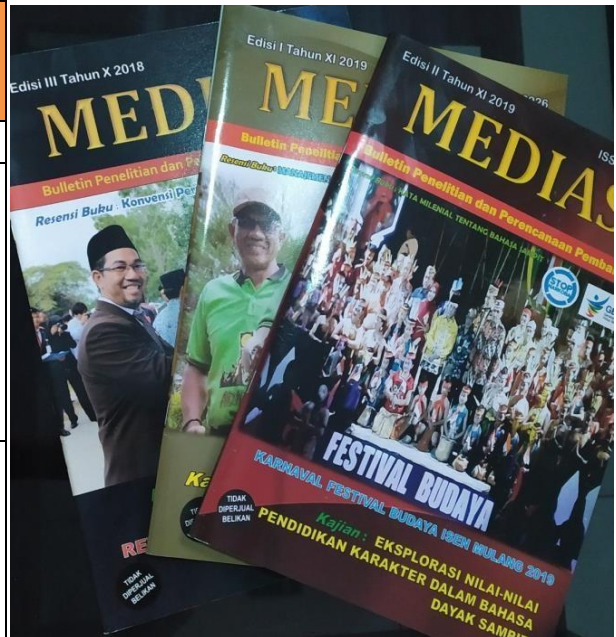
Kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja pada bidang penelitian dan pengembangan / kelitbangan, adalah program Penelitian Sumber daya dan potensi pembangunan daerah, sub kegiatan Publikasi



Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

hasil penelitian dan perencanaan pembangunan, berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK).

SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	
2	3	
Hasil Kajian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	Persentase rekomendasi policy brief yang diakomodasi dalam program perencanaan pembangunan	
Kualitas pelayanan pada sector kelitbangan	Tingkat kepuasan mitra pada pelayanan di bidang penelitian dan pengembangan	



Buletin Mediasi, merupakan produk Bappeda sebagai media informasi Penelitian dan Perencanaan Pembangunan

NO	KEGIATAN	JML ANGGARAN (Rp)	KET
1	Publikasi hasil penelitian dan perencanaan pembangunan	127,800,000	APBD
	Jumlah	127,800,000	

4. Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan pada sektor perencanaan dan kelitbangan

Sesuai Peraturan Bupati Kotim No. 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi Serta Uraian Tugas Bappeda, salah satu tupoksi Bappeda adalah pengoordinasian perencanaan antar perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur maupun instansi lain. Dalam rangka pelayanan koordinasi perencanaan pembangunan daerah, setiap bidang mempunyai tugas pelayanan koordinasi dan konsultasi dalam



Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

penyusunan program dan kegiatan pembangunan pada semua Perangkat Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Untuk menilai tingkat kepuasan pelayanan publik yang diselenggarakan Bappeda, dilakukan dengan cara mengisi kuesioner pada saat SOPD atau mitra kerja ber konsultasi dan berkoordinasi dibidang sesuai bidang mitra kerja yang telah ditentukan dalam uraian tugas Bappeda.

Tabel 3.7

Gradasi nilai hasil analisis / evaluasi hasil SKM :

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja unit Pelayanan
1	1.00 – 2.5996	25.00 – 64.99	D	Tidak memuaskan
2	2.60 – 3.064	65.00 – 76.60	C	Kurang memuaskan
3	3.0644 – 3.532	76.61 – 88.30	B	Memuaskan
4	3.5324 – 4.00	88.31 – 100.00	A	Sangat memuaskan

Unsur yang dinilai dalam Kuisisioner adalah ssebagai berikut :

KODE	UNSUR PELAYANAN	KODE	UNSUR PELAYANAN
U1	Persyaratan	U6	Prilaku pelayanan
U2	Prosedur pelayanan	U7	Kompetensi pelaksana
U3	Sarana dan Prasarana	U8	Penanganan pengaduan
U4	Biaya/Tarif pelayanan	U9	Sarana dan Prasarana
U5	Produk pelayanan	U10	Waktu/Durasi pelayanan

Setiap unsur yang disebutkan akan dinilai sesuai dengan pilihan berikut

A. Sangat memuaskan - bernilai 4



Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP)
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

B. Baik - bernilai 3Cukup/Kurang memuaskan - bernilai 2

C. Tidak memuaskan - bernilai 1

Total Nilai per unsur adalah penjumlahan nilai dari **Responden 1** hingga **Responden 29** Sehingga diperoleh total nilai 102 untuk **U2** (unsur 2), nilai 103 untuk **U7** (unsur 7), nilai 98 untuk **U10** (unsur 10) dan nilai 103 untuk **U8** (unsur 8). Hal ini dilustrasikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.8

Data Nilai Per Unsur Pelayanan

Nomor Responden	Nilai Unsur Pelayanan			
	U2	U7	U10	U8
1	4	3	2	4
2	4	4	4	3
3	4	4	4	3
4	4	4	4	4
5	4	4	4	4
6	3	3	3	3
7	4	4	4	4
8	4	4	4	4
9	3	4	4	4
10	4	4	4	4
11	4	4	4	4
12	3	3	3	3
13	3	3	3	3
14	4	4	4	4
15	4	3	3	2
16	3	3	3	3
17	3	3	3	3
18	4	4	3	4
19	4	4	3	4
20	3	4	3	3
21	3	4	4	4
22	3	4	3	3



Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP)
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

23	3	4	3	4
24	4	3	4	4
25	3	3	3	3
26	3	3	3	4
27	3	3	3	4
28	4	3	3	4
29	3	3	3	3
Total nilai per unsur	102	103	98	103
IKM per unsur	3,52	3,55	3,38	3,55
Total nilai semua unsur	406			
Skor KM total	87,5			

Responden dengan nomor urut 1 memberikan **Nilai 4** pada **unsur 2**, Responden 1 menilai **Sangat baik** pada unsur Prosedur pelayanan. **Nilai 3** (baik) pada **unsur 7** (Kompetensi Pelaksana), **Nilai 2** (Cukup Cepat) pada **unsur 10** (Waktu/Durasi pelayanan) dan **Nilai 4** (Sangat baik) pada **unsur 8** (Penanganan Pengaduan). Begitu pula Responden ke 2 dan Seterusnya.

IKM per unsur adalah hasil dari pembagian dari Total Nilai per unsur dengan Jumlah Responden.

Total nilai semua unsur = Nilai U2+U7+U10+U8 = 102+103+98+103 = **406**

$$\text{IKM per unsur} = \frac{\text{Total nilai per unsur}}{\text{Jumlah Responden}}$$

Sehingga di peroleh nilai **3,52** untuk U2, nilai **3,55** untuk U7, nilai **3,38** untuk U10 dan nilai **3,55** untuk U8.

Sehingga di peroleh nilai **3,52** untuk U2, nilai **3,55** untuk U7, nilai **3,38** untuk U10 dan nilai **3,55** untuk U8.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Skor Kepuasan Masyarakat (Skor KM) dihitung dengan rumus berikut :

$$\begin{aligned}\text{Skor KM Total} &= \frac{\text{Total nilai semua unsur}}{\text{Jumlah responden} \times \text{jumlah unsur}} \times \frac{100}{4} \\ &= \frac{406}{29 \times 4} \times \frac{100}{4} = 3.5 \times 25 = 87.50\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil dari 29 Responden Skor nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Bappeda kabupaten Kotawaringin Timur adalah 87.50. Dengan demikian Bappeda mendapatkan Nilai B pada mutu pelayanan dan mendapatkan predikat *Memuaskan* pada Kinerja Unit Pelayanan.

Dari lembar kuesioner konsultasi yang dinilai per unsur , diolah dan dianalisis sesuai petunjuk penilaian pada Undang – Undang No. 25 tahun 2019, maka didapat sebuah kesimpulan bahwa tingkat gradasi pelayanan Bappeda Kab. Kotim berada pada gradasi nilai *Memuaskan*. (Kuesioner terlampir)

3.1.2. Pencapaian Kinerja Sasaran Bappeda Tahun yang Lalu

Perubahan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Perubahan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Perbandingan capaian kinerja Sasaran Strategis yang ditetapkan Bappeda Tahun 2019 , serta capaian kinerja sasaran tahun 2017 dan Tahun 2018 , adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9

Capaian Kinerja Sasaran Strategis per indikator

No	Indikator	Target Renstra			Realisasi Capaian		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	2	3	5	6	9	10	10
1	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP)
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

2	Tingkat keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Tingkat keselarasan Renja PD terhadap RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah	90%	B	B	B	B	B
5	Persentase hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan Bupati dalam perumusan kebijakan	95%	50%	50%	50%	0%	100%
6	Tingkat kepuasan mitra pada sektor perencanaan dan kelitbangan	N/A	N/A	Memuaskan	N/A	N/A	Memuaskan

Beberapa faktor keberhasilan pada pencapaian kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana Kerja Pemerintah Daerah;
2. Dalam upaya mencapai sasaran strategis di atas, yaitu Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas dengan indikator kinerja persentase Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD, dalam arti terpenuhinya aspek keterkaitan, konsistensi, kelengkapan dan keterukuran dalam dokumen RKPD. Proses Penyusunan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 melalui 3 (tiga) tahapan yaitu : penyusunan rancangan awal RKPD, rancangan RKPD, rancangan Akhir RKPD dan Penetapan RKPD dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom-up* dan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) **BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

top-down.

3. Proses partisipatif , terkait dengan indikator kinerja Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, dilakukan dengan mengikut sertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan antara lain melalui konsultasi publik, forum gabungan perangkat daerah dan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
4. Peran serta Tim verifikator dalam pelaksanaan tugas pelayanan pada mitra kerja dalam memverifikasi keselarasan dokumen renja dan renstra SOPD terhadap RKPD dan RPJMD. sehingga target indikator sejak tahun 2017 dapat tercapai sebesar 100%.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan Urusan Perencanaan Pembangunan terdapat beberapa permasalahan – permasalahan yang meliputi :

1. Belum Optimalnya Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Belum Optimalnya Pengendalian dan Penyelarasan antara Perencanaan dengan Penganggaran.
3. Belum Optimalnya Pengendalian dan Penyelarasan Penjabaran RPJPD ke RPJMD dan RPJMD ke RKPD.
4. Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kabupaten - Provinsi masih perlu ditingkatkan.

Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi:

1. Membangun Sistem Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah SIMRAL
2. Melakukan Pengendalian dan Evaluasi antara Perencanaan dengan Penganggaran.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) **BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

3. Melakukan koordinasi dengan lebih intensif serta melakukan sinkronisasi perencanaan kabupaten - provinsi sebagai bahan Evaluasi dan Review perencanaan kabupaten sehingga selaras dengan dokumen perencanaan kabupaten - provinsi.

3.2. AKUNTABILITAS KEUANGAN

3.2.1. Realisasi Anggaran Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur

Dukungan pembiayaan pelaksanaan kegiatan-kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, berasal dari dana APBD Kabupaten Kotawaringin Timur yang dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Timur TA. 2019.

Total dukungan sumber daya /pendanaan program dan kegiatan Bappeda Tahun Anggaran 2019 dialokasikan belanja daerah sebesar Rp. 9.741.061.700 dan terealisasi sebesar Rp. 8.578.075.354 atau sebesar 88.06 %, yang terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.657.333.550 dan terealisasi Rp. 4.331.346.082 atau 93.00 % dan belanja langsung sebesar Rp. 5.083.728.150 dan realisasi anggaran untuk belanja langsung sebesar Rp. 4.246.729.272 atau mencapai 83.54 persen%. *Rata-rata capaian penyerapan anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung pada Bappeda Kab. Kotim TA.2019 sebesar 88,06%*

Tabel Realisasi Anggran per Program dan Kegiatan Bappeda Kab. Kotim adalah sebagai berikut :



Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP)

BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Tabel Realisasi Anggaran Bappeda T.A. 2019

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI		
				KEUANGAN		FISIK
				Rp.	%	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Penyediaan jasa surat menyurat	1.650.000	1.200.000	72,73	80,00
		2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	207.403.200	158.029.519	76,19	90,00
		3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas / Operasional	49.046.000	24.671.630	50,30	60,53
		4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	209.550.786	193.566.765	92,37	95,96
		5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	107.275.786	101.101.765	94,24	100,00
		6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	3.590.000	3.577.000	99,64	100,00
		7 Penyediaan Alat Tulis Kantor	69.304.000	68.819.000	99,30	100,00
		8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	72.141.000	66.366.300	92,00	96,31
		9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.222.116	15.902.000	98,03	100,00
		10 Penyediaan bahan bacaan dan Perundang-undangan	35.040.000	34.320.000	97,95	100,00
		11 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.500.000	3.275.471	43,67	50,00
		12 Penyediaan Makanan dan Minuman	97.000.000	47.470.000	48,94	55,67
		13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	954.000.000	943.949.020	98,95	100,00
		14 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	206.275.000	150.661.876	73,04	60,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Pembangunan Gedung Kantor	402.490.000	362.361.929	90,03	90,03
		2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	125.900.000	122.180.000	97,05	99,06
		3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	258.300.000	255.490.000	98,91	100,00
		4 Pengadaan Meubelair	105.600.000	105.300.000	99,72	100,00
		5 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	5.100.000	-	-	-
		6 Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan	134.475.262	74.073.335	55,08	57,35
		7 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	19.400.000	13.675.000	70,49	82,27
		8 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	21.000.000	14.240.500	67,81	75,00
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	49.500.000	45.845.000	92,62	100,00
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	306.050.000	176.197.189	57,57	64,45
5	Program Pengembangan Data dan Informasi	1 Penyusunan Dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	9.000.000	6.000.000	66,67	35,00
		2 Publikasi Hasil Pembangunan	28.500.000	28.500.000	100,00	100,00
6	Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Penyusunan Rancangan RKPDP	395.900.000	359.840.000	90,89	100,00
		2 Penyelenggaraan Musrenbang RKPDP	74.150.000	69.125.500	93,22	100,00
		3 Penetapan RKPDP	44.000.000	43.200.000	98,18	100,00
		4 Evaluasi Dan Penilaian Pelaksanaan Hasil Pembangunan	48.825.000	48.367.000	99,06	100,00
		5 Monitoring Hasil Kegiatan Pembangunan	127.000.000	117.290.223	92,35	100,00
		6 Rapat Koordinasi Pengendalian Kegiatan Pembangunan	184.160.000	157.542.550	85,55	92,53
		7 Penyusunan Perubahan RKPDP	197.100.000	177.036.000	89,82	93,19
		8 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Melalui E-Planning	208.560.000	19.179.600	9,20	9,38
7	Perencanaan Sosial Dan Budaya	1 Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	12.320.000	12.320.000	100,00	100,00
		2 Pelaporan Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi	34.150.000	-	-	-
8	Penelitian Sumber Daya Dan Potensi Pembangunan Daerah	1 Publikasi Hasil Penelitian Dan Perencanaan Pembangunan	137.100.000	127.920.000	93,30	96,86
		2 Penguatan Kelembagaan IPTEK	21.150.000	410.000	1,94	3,05
		3 Penelitian/Pengkajian Sumber Daya Dan Potensi Pembangunan Daerah	98.000.000	97.725.100	99,72	100,00

Penjelasan capaian realisasi belanja langsung per kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) **BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

- ❖ Penyediaan jasa surat menyurat terserap sebesar 72,73% dikarenakan belanjanya berdasarkan kebutuhan administrasi kantor.
- ❖ Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terserap sebesar 76,19% dikarenakan belanjanya berdasarkan pemakaian dan tagihan perbulannya terdiri dari 5 rekening listrik, 5 rekening telepon dan 1 speedy, 1 astinet sehingga kebutuhan administrasi kantor terpenuhi.
- ❖ Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional terserap sebesar 50,30% karena adanya perubahan harga BBM, biaya service, penggantian suku cadang sesuai kebutuhan serta pembayaran pajak kendaraan sesuai dengan yang dibayarkan.
- ❖ Penyediaan jasa administrasi keuangan terserap 92,37% untuk pembayaran panitia pelaksana kegiatan dan tim pengadaan barang dan jasa sesuai dengan standar biaya honor barang dan jasa Kabupaten Kotawaringin Timur.
- ❖ Penyediaan jasa kebersihan kantor terserap 94,24% adanya harga peralatan kebersihan, bahan bakar minyak/ olie yang berubah sehingga menyesuaikan dengan harga dan kebutuhan dan untuk pembayaran upah operasional kegiatan.
- ❖ Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja terserap 99,64% karena adanya harga BBM dan peralatan yang berubah sehingga penggunaannya berdasarkan kebutuhan dan manfaat.
- ❖ Penyediaan alat tulis kantor terserap 99,30%, terpenuhinya kebutuhan administrasi kantor seperti kebutuhan ATK untuk kelancaran kerja pegawai.
- ❖ Penyediaan barang cetakan dan penggandaan terserap 92%.
- ❖ Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor terserap sebesar 98,03%.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) **BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

- ❖ Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan terserap sebesar 97,59% terpenuhinya adminitrasi kantor untuk pembayaran langganan koran seperti Radar Sampit, Kalteng Pos, Borneo News.
 - ❖ Penyediaan bahan logistk kantor terserap sebesar 43,67% karena belanja ini penggunaannya menyesuaikan kebutuhan kegiatan kantor.
 - ❖ Penyediaan makanan dan minuman terserap sebesar 48,94%, karena belanja ini penggunaannya menyesuaikan kebutuhankegiatan makan minum rapat staf dan rapat-rapat kegiatan yang ada dibidang.
 - ❖ Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah terserap sebesar 98,95 %.
 - ❖ Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah terserap sebesar 73,04 % dikarenakan Tahun 2019 tidak ada kegiatan Musrenbang Desa dan kegiatan Survey Data Desa.
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- ❖ Pembangunan Gedung Kantor terserap sebesar 89,96% dikarenakan untuk belanja modal pembangunan gedung tempat kerja dan peningkatan jalan kantor sesuai nilai kontrak.
 - ❖ Pengadaan perlengkapan gedung kantor terserap sebesar 97,05 %.
 - ❖ Pengadaaan peralatan gedung kantor terserap sebesar 98,91%.
 - ❖ Pengadaan Meubelair terserap sebesar 99,48%.
 - ❖ Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor tidak terserap (0,00%) dikarenakan belanja pemeliharaan inimenyesuaikan kebutuhan dan kondisi gedung kantor.
 - ❖ Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan terserap sebesar 55,08% karena belanja ini hanya digunakan untuk pembayaran service, penggantian suku cadang serta penggantian BBM/ olie hanya



Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) **BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

dilakukan sesuai kebutuhan, pajak mobil jabatan dan upah operasional kegiatan.

- ❖ Pemeliharaan rutin/ berkala Perlengkapan gedung kantor terserap sebesar 70,49% dikarenakan penggunaan belanja pemeliharaan perlengkapan gedung kantor hanya berdasarkan kebutuhan dan kondisi barang.
- ❖ Pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan gedung kantor terserap sebesar 82,45% dikarenakan penggunaan belanja pemeliharaan peralatan gedung kantor hanya berdasarkan kebutuhan dan kondisi barang.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- ❖ Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu berupa pakaian batik tradisional dan seragam hitan putih terserap sebesar 92,62%.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- ❖ Pendidikan dan pelatihan formal terserap sebesar 57,57%, karena ada beberapa pelatihan yang diikuti tidak menggunakan kontribusi dan ada juga yang sudah ditanggung oleh panitia penyelenggara pelatihan, adapun kegiatan ini terdiri dari perjalanan dinas luardaerah dan dalam daerah khusus pelatihan dan bimtek.

5. Program Pengembangan Data dan Informasi

- ❖ Penyusunan dan pengumpulan data/ informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan terserap 66,67%. Dikarenakan untuk penggandaan buku SIPD tidak dapat dilaksanakan . Hal ini dikarenakan Aplikasi SIPD Kemendagri menu E, data base tidak dapat diakses terhubung aplikasi tersebut melakukan Tarik data pusat, pemetaaan dan integrasi dengan Kementrian atau lembaga terkait serta pengembangan aplikasi kedepanya.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP)
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

- ❖ Publikasi Hasil Pembangunan terserap 100% yaitu berupa kegiatan publikasi yang memberikan data dan informasi perencanaan dan Realisasi Hasil Pembangunan pada acara Sampit Expo.
6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- ❖ Penyusunan Rancangan RKPD terserap sebesar 90,89%.
 - ❖ Penyelenggaraan Musrenbang RKPD terserap sebesar 93,22%.
 - ❖ Penetapan RKPD terserap sebesar 98,18%.
 - ❖ Evaluasi dan penilaian pelaksanaan hasil pembangunan terserap sebesar 100%.
 - ❖ Monitoring hasil Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur terserap sebesar 92,35%, kegiatan ini merupakan kegiatan perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan pada triwulan IV serta cetak dan penggandaan buku yang isinya foto-foto hasil pembangunan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur.
 - ❖ Rapat koordinasi pengendalian kegiatan pembangunan sebesar 85,55% merupakan kegiatan rapat Teppra perbulan dan Rakordal yang diadakan pertriwulan, penggandaan bahan rapat serta perjalanan dinas luar daerah sesuai dengan surat undangan.
 - ❖ Penyusunan perubahan RKPD terserap sebesar 89,82%. Secara realisasi keuangan yaitu untuk belanja makan minum rapat tidak terlaksana karena menyesuaikan kebutuhan pelaksanaan tahapan Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019. Dan secara fisik pembuatan dan penggandaan buku Perubahan RKPD Tahun 2019 dan Perubahan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur telah selesai dilaksanakan serta honorarium tim pelaksana kegiatan.
 - ❖ Sinkronisasi perencanaan pembangunan melalui E-Planning terserap sebesar 9,20% dikarenakan untuk honorarium Tim Pelaksana E-Planning SIMRAL Tahun 2019 terintegrasi di Sekretariat Daerah



Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) **BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Kabupaten Kotawaringin Timur, sehingga honor Tim E-Planning SIMRAL di Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur tidak digunakan.

7. Program Perencanaan Sosial dan Budaya

- ❖ Rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah terserap 100%.
- ❖ Pelaporan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi terserap sebesar 0,00%, dikarenakan adanya pelimpahan pelaporan dari KSP kepada KPK, maka atas arahan Bappedalitbang Propinsi Kalimantan Tengah, pelaksana kegiatan Aksi-PPK di daerah memerlukan petunjuk pelaksanaan yang secara normative berupa surat edaran Menteri Dalam Negeri, dimana surat edaran dimaksud hingga akhir Tahun 2019 tidak pernah diterima oleh Daerah.

8. Program Penelitian sumber Daya dan Potensi Pembangunan Daerah

- ❖ Publikasi Hasil Penelitian dan Perencanaan Pembangunan terserap sebesar 93,30% berupa Buletin Hasil Kajian dan Penelitian sekitar Pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur per triwulannya. Dan buletin ini didistribusikan keseluruh SKPD, DPRD, Kepala Desa melalui Camat dan lembaga lainnya di Kabupaten Kotawaringin Timur.
- ❖ Penguatan Kelembagaan IPTEK terserap sebesar 1,94%, secara keseluruhan kegiatan tidak bisa dilaksanakan karena proses :
 - 1). Usulan/ draft SK pembentukan Tim Dewan Riset Daerah (DRD) untuk periode 2019-2023 pada saat diusulkan berdasarkan UU RI no. 18 Tahun 2002 sudah tidak berlaku sebagai gantinya UU RI no. 11 Tahun 2019 tanggal 13 Agustus 2019.
 - 2). Sebagai gantinya pengorganisasian kelitbangan di daerah berdasarkan Permendagri no. 17 Tahun 2016 terdiri dari Majelis



Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Pertimbangan (MP), Tim Pengendali Mutu (TPM) dan Tim Kelitbangan (TK).

- ❖ Penelitian/ Kajian Sumber Daya dan Potensi Pembangunan Daerah terserap sebesar 99,72%.



Efisiensi Penggunaan Anggaran Per Program

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Total pagu per Program	Total realisasi per Program	Efisiensi anggaran
	2,035,997,888	1,812,910,346	223,087,542
		89%	11%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,072,265,262	947,320,764	124,944,498
	88.35	88%	11,5%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	49,500,000	45,845,000	3,655,000
		93%	7%
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	306,050,000	176,197,189	129,852,811
		58%	42%
Program Pengembangan Data dan Informasi	37,500,000	34,500,000	3,000,000
		92%	8%
Perencanaan Pembangunan Daerah	1,279,695,000	991,580,873	288,114,127
		77,5%	22,5%



Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP)
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Perencanaan Sosial Dan Budaya	46,470,000	12,320,000	34,150,000
	26.51	27%	73%

Penelitian Sumber Daya Dan Potensi Pembangunan Daerah	256,250,000	226,055,100	30,194,900
		89%	11%



Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) **BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik

LKIP Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2019 merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.

Selanjutnya hasil pengukuran capaian kinerja beserta analisisnya sesuai mekanisme penghitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi Bappeda Kab. Kotim.

Dengan sederet tanggung jawab tersebut, maka Bappeda harus memiliki strategi atau alat agar apa yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan lancar, dipantau, dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Alat pendukung kegiatan Bappeda tersebut adalah e-planning. E-Planning adalah alat penyusunan RKPD, KUA PPAS, KUA/PPAS Perubahan, RKPD Perubahan Kabupaten/Provinsi agar dapat terselesaikan dengan mudah, cepat, dan tepat.

Sejak tahun 2018, Bappeda bekerjasama dengan BPPT, menyusun perencanaan pembangunan daerah menggunakan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) **BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

aplikasi SIMRAL, yaitu Sistem Informasi Perencanaan , Penganggaran dan Pelaporan. Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL) merupakan wujud inovasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk membangun tertib administrasi dan terjaganya konsistensi data pembangunan daerah, dengan demikian pengelolaan program dan kegiatan pembangunan serta pengelolaan keuangan di daerah bisa dipertanggungjawabkan, dan transparan.

Dengan menggunakan aplikasi e-Planning , dapat menjaga sinkronisasi antar dokumen perencanaan, yaitu RPJMD, RKPD dan Renstra SOPD dan Renja SOPD hingga dokumen RKA dan DPA SOPD.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja didapat bahwa rata-rata capaian sasaran tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD adalah *sebesar 100%* , keselarasan renstra SOPD terhadap RPJMD *sebesar 100%*, dan Keselarasan Renja SOPD terhadap RKPD *sebesar 100%*, sehingga rata-rata tingkat capaian keselarasan adalah 100%, berada pada gradasi nilai *Berhasil*.

Berdasarkan skala intensitas pencapaian kinerja, pencapaian kinerja keuangan Bappeda termasuk dalam grade up berhasil, dan sesuai prinsip pengelolaan keuangan dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin tapi mendapat manfaat sebesar mungkin.

4.2. PERMASALAHAN

Dari hasil evaluasi kinerja pada Bappeda Kab. Kotim selama tahun 2019 dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan pada Bappeda Kab. Kotim masuk dalam kriteria berhasil, namun demikian masih terdapat permasalahan dalam segi internal dan eksternal.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) **BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dari segi internal, Bappeda masih kekurangan aparatur yang memiliki kemampuan dibidang penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam segi eksternal, penyampaian data Capaian Kinerja program dan kegiatan oleh SOPD se-Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kecamatan sering tidak tepat waktu, sehingga berpengaruh kepada perhitungan pencapaian kinerja yang tidak akurat.

Adapun langkah – langkah untuk meminimalkan hambatan – hambatan yang ada adalah sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi intensif terhadap pelaksanaan kegiatan yang dikonsentrasikan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
2. Meningkatkan fungsi koordinasi antar internal Badan dan antar SOPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

4.3. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan internal dan eksternal organisasi, diperlukan strategi dalam peningkatan kinerja. Beberapa strategi tersebut antara lain :

1. Kebijakan Internal, yaitu kebijakan Pimpinan Bappeda dalam upaya meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dengan upaya sebagai berikut :
 - a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia/ aparatur;
 - b. Peningkatan profesionalitas, produktifitas dan disiplin aparatur dalam rangka mendukung perencanaan daerah yang berkualitas
 - c. Tersedianya dokumen pendukung penyusunan perencanaan pembangunan daerah



Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP)
BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

- d. Meningkatkan upaya dalam koordinasi dan evaluasi dalam perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan dan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan.
2. Kebijakan Eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh Bappeda dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat sebagai berikut :
 - a. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan;
 - b. Pemanfaatan data, informasi dan kajian sebagai bahan penyusunan kebijakan
 - c. Pemanfaatan teknologi secara optimal dalam penyampaian data dan informasi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dalam rangka monitoring dan evaluasi oleh seluruh SOPD;
 - d. Memfasilitasi instansi ataupun lembaga dalam melaksanakan kegiatan secara terpadu.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kab. Kotawaringin Timur yang menggambarkan capaian kinerja tujuan dan sasaran pada Tahun 2019 dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Sampit, Pebruari 2019

Plt.KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

RAMADANSYAH S.E.,M.Ec.Dev
Pembina
NIP. 19740902 199403 1 003